

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, terdapat tuntutan pemerintah untuk bertanggung jawab. Menurut Mahmudi (2015) Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau costumernya.. Masyarakat setempat mempercayai pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahan daerahnya. Selama periode tertentu, mereka harus bertanggung jawab atas program atau kegiatan yang telah dilakukan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat, bertanggung jawab atas program yang tercakup dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Akuntabilitas pemerintah dapat ditunjukkan dengan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun sesuai standar.

Teori keagenan merupakan fondasi bagi praktik pelaporan keuangan di pemerintah daerah. Sebagai agen, pemerintah bertugas untuk menyediakan informasi yang berguna bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas.. Pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pihak-pihak yang berkepentingan ditampilkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Diharapkan hasil laporan keuangan dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 1, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk mendukung pengambilan keputusan

dan menunjukkan bahwa entitas pelaporan bertanggung jawab atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.. Selain itu, masyarakat juga merupakan kelompok yang membutuhkan informasi mengenai kinerja pemerintah daerah yang disajikan dalam laporan keuangan daerah.

Selain itu, untuk membuat anggaran untuk periode selanjutnya, LKPD dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan. Oleh sebab itu, diharapkan bahwa laporan LKPD mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang berlaku untuk memastikan bahwa mereka berkualitas tinggi. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010, laporan keuangan pemerintah daerah harus relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang berupa opini dapat digunakan untuk membuktikan kualitas LKPD tersebut. Ada empat kategori opini: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, dan Tidak Menyatakan Pendapat.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan berfungsi sebagai standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Ini adalah salah satu komponen yang dapat memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas. Apabila standar akuntansi pemerintahan diterapkan dengan benar dan tepat, laporan keuangan yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang baik.. Namun, meskipun standar akuntansi pemerintahan (SAP) diterapkan, banyak daerah yang belum melakukannya, sehingga berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Pernyataan ini didukung penelitian (Faturey et al., 2021), (Suwanda, 2015), dan (Hasanah et al.,

2021), yang menemukan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan (SAP) memengaruhi kualitas laporan keuangan. Namun, penelitian (Nurlis, 2018) menemukan bahwa kualitas laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh implementasi sistem akuntansi pemerintahan (SAP).

Sistem pengendalian internal adalah komponen tambahan yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Jika sistem pengendalian internal tidak dilaksanakan dengan benar, hal itu berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Pradono & Basukianto, 2015), (Siahaya et al., 2018), (Astika & Yasa, 2018), (Faturey et al., 2021), dan (Wiratama & W, 2022), kualitas laporan keuangan dipengaruhi secara signifikan oleh sistem pengendalian internal. Namun, temuan penelitian ini bertentangan dengan (Suwanda, 2015), (Hasanah et al., 2021), dan (Safiri & Zulkarnain, 2021), yang menemukan bahwa sistem pengendalian internal tidak memberdayakan laporan keuangan.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan (SAP) secara efektif. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap subjek dapat menunjukkan kompetensi tersebut. Kualitas sumber daya manusia dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Ini didukung oleh penelitian seperti yang dilakukan oleh (Pradono & Basukianto, 2015), (Siahaya et al., 2018), (Astika & Yasa, 2018), dan (Nilawati et al., 2021). Namun, temuan dari penelitian (Suwanda, 2015), (Erawati & Abdulhadi, 2018), (Aswandi, 2018), (Hariani, 2020), (Hasanah et al., 2021), dan (Safiri & Zulkarnain, 2021) menunjukkan bahwa kualitas SDM tidak memengaruhi kualitas laporan keuangan.

Pemanfaatan teknologi informasi adalah komponen kelima yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih baik jika digunakan teknologi informasi yang lebih baik. Penelitian oleh (Pradono & Basukianto, 2015), (Erawati & Abdulhadi, 2018), (Hariani, 2020), (Safiri & Zulkarnain, 2021), dan (Nilawati et al., 2021) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, penelitian oleh (Suwanda, 2015), (Aswandi, 2018), dan (Wahyuni et al., 2018) menemukan hasil yang berbeda.

Komitmen organisasi adalah salah satu komponen yang dapat memengaruhi laporan keuangan yang baik. Laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipengaruhi oleh kualitas komitmen antara pemimpin dan pengikut. Ini didukung oleh penelitian oleh (Suwanda, 2015), (Modo et al., 2016), yang menemukan bahwa komitmen organisasi memengaruhi kualitas laporan keuangan. Namun, penelitian (Astika & Yasa, 2018) mencapai hasil yang berbeda. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Rekonsiliasi merupakan komponen keenam yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin sering rekonsiliasi dilakukan, semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Studi yang dilakukan oleh (Pradono & Basukianto, 2015) mendukung pernyataan tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Suryaningsih & HB, 2021) kepatuhan rekonsiliasi tidak berpengaruh signifikan terhadap validitas laporan keuangan. Kepatuhan rekonsiliasi menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap validitas laporan keuangan pada satuan kerja dilingkungan Kementerian Perhubungan.

Audit yang dilakukan oleh perwakilan BPK provinsi Jawa Timur sangat penting untuk mengevaluasi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, terutama di wilayah Madura.. Madura memiliki 4 kabupaten yang tersebar yakni Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep, keempat kabupaten ini memiliki latar belakang berbagai faktor yang mempengaruhi Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap laporan keuangan berupa opini dari Kepala Perwakilan BPK. Beberapa faktor memainkan peran dalam keberhasilan opini yang diraih yaitu implementasi standar akuntansi pemerintahan (SAP), sistem pengendalian internal (SPI), kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, dan rekonsiliasi.

Penulis ingin meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal Ini dilakukan karena fakta-fakta yang ada saat ini dan didukung oleh hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena perbedaan variable yang digunakan beserta dengan objeknya yang lebih luas yakni 4 kabupaten di Madura. Hasil penelitian yang dihasilkan oleh peneliti sebelumnya mungkin berbeda dari hasil peneliti sebelumnya. Akibatnya, Penulis memilih untuk melakukan penelitian dengan judul: **pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, dan rekonsiliasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada pemerintah daerah di madura)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis akan merumuskan masalah dalam penelitian mengenai:

1. Apakah Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal (SPI) dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah Kualitas SDM dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah Komitmen Organisasi dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
6. Apakah Rekonsiliasi dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk;

1. Mengetahui pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Mengetahui pengaruh Kualitas SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Mengetahui pengaruh pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Mengetahui pengaruh Komitmen Organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
6. Mengetahui pengaruh Rekonsiliasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian akan membantu mengembangkan penelitian akuntansi saat ini dan memperkuat penelitian sebelumnya tentang pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, dan rekonsiliasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

Untuk pemerintah daerah, sebagai pemahaman tentang dampak implementasi standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, dan rekonsiliasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk akademisi, penelitian ini membantu penelitian berikutnya.